



RENJA POKOK 2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
BKPSDM



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan dokumen RENJA ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi dan substansi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dokumen ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman materi. Sehubungan dengan hal tersebut, saran, masukan, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penyusunan dokumen ini dapat terlaksana dengan lancar.

Malili, 01 September 2025

Plt. Kepala BKPSDM



PARHA ARIEF, S.AP

Pangkat: Penata Tk.1

NIP. 19840114 200312 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur	37
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM.....	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur	64
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	83
BAB V	88
PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan tetap memperhatikan Sumber Daya Manusia yang tersedia.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

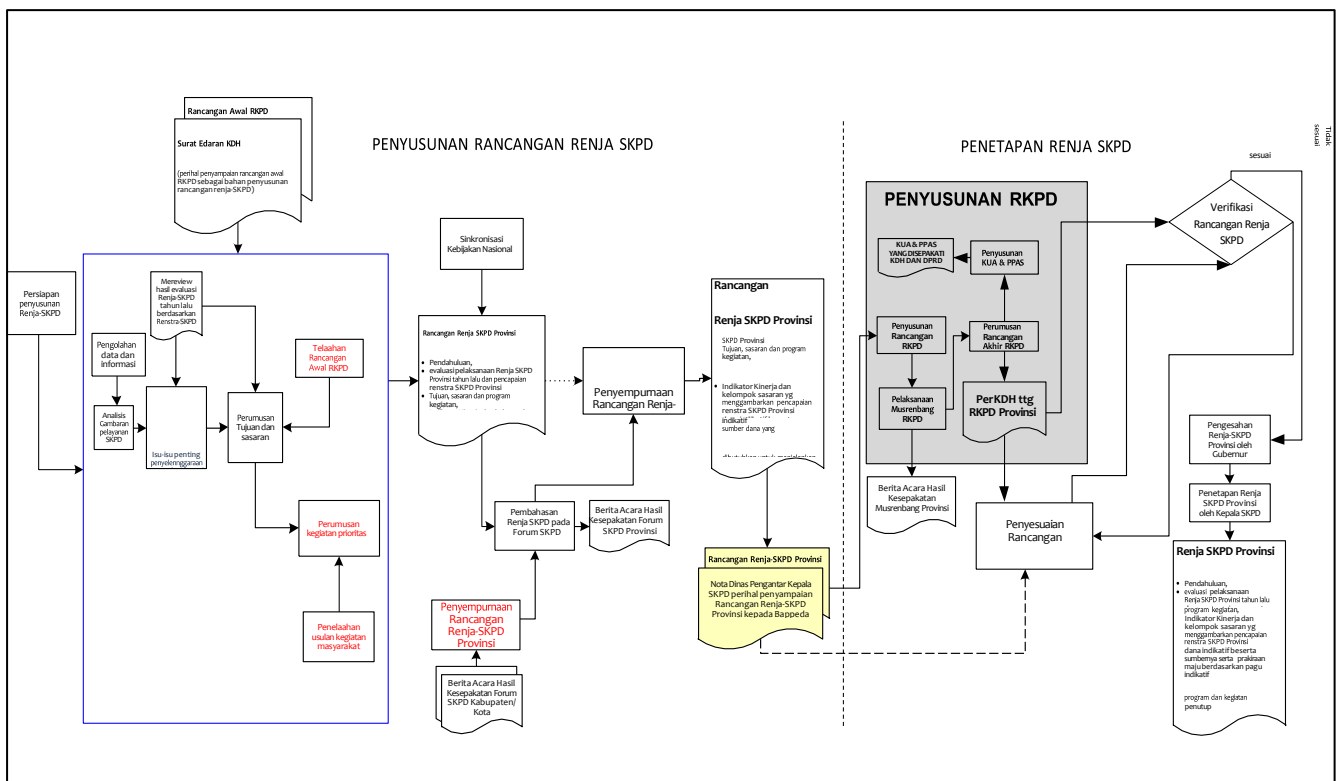
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara

- substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
 - Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Baglan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1: Baglan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD



Rencana Kerja merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacuh pada Renstra Perangkat Daerah dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambhaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 50);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 :

- Sebagai dokumen perencanaan tahunan Tahun 2026;
- Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Sebagai pedoman untuk pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah sesuai Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 adalah :

- Memberikan gambaran mengenai target kinerja sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2026;

- Memberikan gambaran mengenai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2026;
- Memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja Perubahan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan, Proses penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan Renja Perubahan SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan BKPSDM.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka memantapkan dan menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi yang komprehensif terhadap capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut mencakup hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (*). Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan perencanaan ke depan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kab. Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan & sub kegiatan s.d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2025 (Renja Perubahan SKPD) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2025 (tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai Standar	100	%	100	%	100	%	100	%
5.03.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	10	Doku men	10	Doku men	100	%	11	Doku men

		(Dokumen)																
5.03.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang Disusun tepat Waktu (Dokumen)	2	Doku men	2	Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	%	2	Doku men	0	Doku men	0	%
5.03.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	Doku men	2	Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	%	2	Doku men	0	Doku men	0	%
5.03.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat Waktu (Dokumen)	13	Lapor an	14	Doku men	14	Lapo ran	14	Doku men	21	%	14	Doku men	8	Doku men	57,14	%
5.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	95	%	103,38	%	95	%	100,43	%	105,72	%	95	%	75,31	%	79,28	%
5.03.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	48	Oran g	28	Oran g	29	Oran g	29	Oran g	100,86	%	47	oran g	29	oran g	90,63	%
5.03.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semestera	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat	5	Lapor an	5	Lapor an	5	Lapo ran	5	Lapor an	100	%	5	Lapo ran	3	Lapo ran	60	%

	n	waktu (Dokumen)																
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Teradministrasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun (Laporan)	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	%	4	Laporan	1	Laporan	100	%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian sesuai Standar	100	%	100	%	100	%	79,17	%	79,17	%	100	%	36,79	%	36,79	%
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	4	Orang	9	Orang	8	Orang	4	Orang	50	%	6	orang	4	orang	57,14	%
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	Orang	6	Orang	3	Orang	2	Orang	66,67	%	0	orang	0	orang	0	%

		(orang)																
5.03.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	7	Orang	14	Orang	20	Orang	20	Orang	10	%	12	orang	12	orang	34,87	%
5.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	75	%	75	%
5.03.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	Paket	11	Paket	13	Paket	13	Paket	100	%	13	Paket	13	Paket	100	%
5.03.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	Paket	19	Paket	15	Paket	15	Paket	100	%	17	Paket	17	Paket	100	%
5.03.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	29	Paket	24	Paket	30	Paket	30	Paket	100	%	32	Paket	32	Paket	100	%
5.03.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah paket barang cetakan	9	Paket	3	Paket	5	Paket	5	Paket	100	%	4	Paket	4	Paket	100	%

	dan Penggandaan	dan penggandaan yang disediakan (Paket)																
5.03.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	Doku men	48	Ekse mpla r	4	Doku men	4	Doku men	100	%	2	Doku men	2	Doku men	50	%
5.03.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	Lapor an	77 5	Oran g	12	Lapo ran	12	Lapor an	100	%	2	Lapo ran	2	Lapo ran	50	%
5.03.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Lapor an	29 7	Kali	12	Lapo ran	12	Lapor an	100	%	2	Lapo ran	1	Lapo ran	50	%
5.03.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Doku men	4	Doku men	4	Doku men	4	Doku men	100	%	2	Doku men	1	Doku men	50	%
5.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	100	%	10 0	%	100	%	91,67	%	91,6 7	%	100	%	0	%	0	%
5.03.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0	Unit	1	Unit	3	Unit	2	Unit	66,6 7	%	0	unit	0	Unit	0	%

		Dinas Jabatan yang Disediakan																
5.03.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	11	Unit	59	Unit	59	Unit	100	%	10	Unit	0	Unit	0	%
5.03.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	28	Unit	11	Unit	11	Unit	100	%	22	Unit	0	Unit	0	%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	0	Unit				
5.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan	100	%	90,96	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%
5.03.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat menyurat (Laporan)	4	Laporan	1484	Surat	12	Laporan	12	Laporan	100	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%
5.03.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	27	Rekening	4	Laporan	4	Laporan	100	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%

5.03.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lapor an	8	Oran g	4	Lapo ran	4	Lapor an	100	%	2	Lapo ran	1	Lapo ran	50	%
5.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang dipelihara secara Berkala	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	85,4 4	%	85,44	%
5.03.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100	%	6	Unit	6	Unit	100	%
5.03.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100	%	6	Unit	6	Unit	100	%
5.03.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	82	Unit	73	Unit	76	Unit	76	Unit	100	%	82	Unit	33	Unit	41,77	%

5.03.01.2.0 9.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	1	Unit	1	Unit	100	%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																	
5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang difasilitasi Pengadaan, Pemberhentian, dan Data Kepegawaiannya	95	%	100,28	%	95	%	100	%	102,04	%	95	%	37,5	%	39,47	%
5.03.02.2.0 1.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1	Dokumen	4820	Formasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%
5.03.02.2.0 1.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	4	Dokumen	671	Orang	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.02.2.0 1.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi	4	Dokumen	78	Orang	12	Dokumen	12	Dokumen	100	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%

		pelaksanaan administrasi pemberhentian																
5.03.02.2.0 1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	Doku men	6	Aplik asi	4	Doku men	4	Doku men	100	%	4	Doku men	2	Doku men	50	%
5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang Dimutasi dan Promosi	95	%	14 0,6 6	%	95	%	100	%	105, 26	%	95	%	33,3 3	%	35,09	%
5.03.02.2.0 2.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Doku men	11 6,7 5	Perse n	4	Doku men	4	Doku men	100	%	4	Doku men	2	Doku men	50	%
5.03.02.2.0 2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12	Doku men	10 0,0 4	Perse n	4	Doku men	4	Doku men	100	%	4	Doku men	2	Doku men	50	%
5.03.02.2.0 2.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN	1	Doku men	99, 70	Perse n	1	Doku men	1	Doku men	100	%	1	Doku men	0	Doku men	0	%
5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	95	%	14 7,4 0	%	95	%	99,90	%	105, 16	%	95	%	95	%	100	%

5.03.02.2.0 3.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen pengelolaan Assessment Center	2	Doku men	74, 72	Perse n	4	Doku men	4	Doku men	100	%	1	Doku men	0	Doku men	0	%
5.03.02.2.0 3.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	9	Oran g	10 0	Oran g	5	Oran g	5	Oran g	100	%	5	Oran g	5	Oran g	100	%
5.03.02.2.0 3.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	200	Oran g	99, 61	Perse n	175 0	Oran g	1745	Oran g	99,7 1	%	150	Oran g	91	Oran g	18,20	%
5.03.02.2.0 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian dan Evaluasi kinerja	95	%	87, 35	%	95	%	102,22	%	107, 60	%	95	%	100	%	23.4	%
5.03.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4	Doku men	99	Perse n	4	Doku men	4	Doku men	100	%	4	Doku men	2	Doku men	50	%
5.03.02.2.0 4.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	336	Oran g	93 ,33	Perse n	84	Oran g	84	%	100	%	532	Oran g	0	Oran g	0	%
5.03.02.2.0 4.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan	8414	Oran g	10 5,2 6	Perse n	9	Oran g	9	Oran g	100	%	35	Oran g	20	Oran g	57.1	%

		kedisiplinan																
5.03.02.2.0 4.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	4	Doku men	13 3,3 3	Perse n	2	Doku men	2	Doku men	100	%	2	Doku men	1	Doku men	50	%
5.03.02.2.0 4.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan hasil evaluasi disiplin ASN	4	Lapor an	11 7,6 5	Perse n	1	Lapo ran	1	Lapor an	100	%	2	Lapo ran	1	Lapo ran	50	%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
5.04.02.2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Lulus dan Bersertifikat Kompetensi Teknis melalui BKPSDM	100	%	46 ,15	%	100	%	91,71	%	91,7 1	%	100	%	60	%	60	%
5.04.02.2.0 1.03	Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	230	Oran g	27 5	Oran g	356	Oran g	297	Oran g	83,4 3	%	328	Oran g	102	Oran g	60	%

5.04.02.2.0 1.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil pembinaan, pengoordinasia n, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara an urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	4	Doku men	5	Jenis	6	Doku men	6	Doku men	100	%	8	Doku men	2	Doku men	66,67	%
5.04.02.2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Tersertifikasi dan Dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional melalui BKPSDM	95	%	34, 65	%	100	%	21,40	%	21,4 0	%	100	%	25,5 6	%	25,56	%

5.04.02.2.0 2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah (Dokumen) kebijakan Teknis dan rencana sertifikasi Kompetensi, pengelolaan Kelembagaan, tenaga Pengembang kompetensi, Sumber belajar, kerjasama, Pengembangan kompetensi Pimpinan daerah, jabatan Pimpinan tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional yang disusun	7	Doku men	3	Jenis	9	Doku men	9	Doku men	100	%	9	Doku men	2	Jenis	25	%
5.04.02.2.0 2.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan hasil penyelenggara an pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3	Lapor an	90, 98	Perse n	3	Lapo ran	3	Lapor an	100	%	1	Lapo ran	0	Lapo ran	0	%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan capaian program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut :

- ❖ Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penyusunan dokumen RKA SKPD yang Disusun tepat Waktu dilakukan pada triwulan III
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penyusunan dokumen DPA SKPD yang Disusun tepat Waktu dilakukan pada triwulan III dan IV
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan di triwulan III
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan di triwulan III dan IV
 2. Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan ASN realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penyusunan dokumen hasil penyusunan rencana dirampungkan pada akhir tahun anggaran
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pegawai realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penyusunan Dokumen Pengelolaan Promosi ASN dirampungkan pada akhir tahun anggaran

- c. Pengembangan Kompetensi ASN
 - Pengelolaan Assessment Center Pegawai realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penyusunan Dokumen pengelolaan Assessment Center dirampungkan pada akhir tahun anggaran
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai realisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penyerahan penghargaan dilakukan pada triwulan III
- 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan relaisasi kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penyusunan dokumen rampaung pada akhir tahun anggaran.

- ❖ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
Adapun Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah :
 1. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan rencana aksi dan anggaran kas
 3. Penentuan target yang tidak tepat
- ❖ Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja sebagai berikut
 1. Perhitungan kebutuhan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
 2. Perbaikan target pada saat perubahan renja
 3. Adanya crosscutting antar OPD
- ❖ Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja sebagai berikut :
 1. Terdapat sub kegiatan yang anggarannya bisa membiayai lebih dari target yang direncanakan
 2. Bisa saja penetapan target yang tidak tepat
- ❖ Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
 1. Penetapan target yang tidak tepat mengakibatkan capaian Renstra OPD tidak sesuai perencanaan
 2. Terjadi ketimpangan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan) pada saat penyusunan evaluasi Renstra (Form E-80).
- ❖ Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah :
 1. Melakukan koordinasi lintas OPD terkait (Crosscutting program dan kegiatan) yang memungkinkan tercapainya target kinerja sesuai Renstra.
 2. Melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Dunia Usaha yang memungkinkan untuk pencapaian kinerja OPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi

pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja.

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2030
			2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase ASN yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	99,92%	99,75 %	99,81 %	99,85 %	99,87 %	99,89 %	99,95%
Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	34,71%	26,29 %	30,63 %	35,83 %	42,04 %	49,35 %	57,87%
Persentase Pejabat Struktural yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	%	75,25%	78,72 %	79,67 %	82,03 %	84,40 %	86,76 %	89,13%
Persentase Pejabat Fungsional yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional	%	7,76%	7,09%	6,86%	10,22 %	12,84 %	14,63 %	18,08%
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	77,45	75,75	75,95	76,21	76,95	77,50	79,00

Adapun pencapaian Kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan IKU dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n- 1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas disiplin ASN	Cakupan /Persentase ASN yang tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	99,95	99,99	100	100	99.78%	99.92%	99,75%	99,81%	
3	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	82,10	83,50	85,00	85,00	76.38%	68.19%			
		Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%							26,29%	30,63%	
		Persentase Pejabat Struktural yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	%							78,72%	79,67%	
		Persentase Pejabat Fungsional yang	%							7,09%	6,86%	

		mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional										
4	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggara an urusan pemerintah daerah	NILAI SAKIP		72	77	75,50	75,75	76,21	76,95	77,50	79,0	

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin terealisasi sebesar 99,94% dengan target sebesar 99,99% dari 5.219 orang ASN Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Juni 2025 yang tidak dijatuhi hukuman disiplin sehingga capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 ini terealisasi sebesar 99,95% dan terdapat 3 orang ASN yang dijatuhi hukuman disiplin terkait kasus tidak disiplin masuk kerja. sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 terdapat 20 orang pegawai yang terjaring melakukan pelanggaran disiplin, 3 orang dilaporkan terkait kasus perselingkuhan dan 17 orang lainnya dilaporkan terkait kasus pelanggaran Netralitas ASN, telah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil diantaranya 3 orang telah dikenakan hukuman disiplin dengan pemberian sanksi moral/etik, 9 orang dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin dan 5 orang lainnya saat ini masih dalam proses penilaian hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Netralitas ASN. Dengan hasil uraian capaian data yang diperoleh sebanyak 3 orang ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin sampai dengan Triwulan II. Dan sampai dengan 30 Juni 2025 terdapat 5.219 orang ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin, Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai dan menurunkan tingkat pelanggaran disiplin pegawai Kabupaten Luwu Timur maka akan terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait regulasi dan aturan terbaru diantaranya meningkatkan kinerja, motivasi kerja meningkat dan memiliki etos kerja yang baik sesuai aturan-aturan kepegawaian yang berlaku sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan kesadaran bagi ASN untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan menciptakan perilaku ASN yang berdisiplin baik
2. Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional memiliki sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur, Jumlah ASN Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 sebanyak 5.222 orang (3.611 orang PNS dan 1.611 orang PPPK) dan berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan Triwulan II per 30 Juni Tahun Anggaran 2025 diketahui sebanyak 4.062 orang pegawai telah memiliki sertifikat kompetensi baik teknis, manajerial maupun fungsional, Adapun realisasi kinerja sebesar 77,79% dari target 85% sehingga capaiannya adalah sebesar 91,52%. Indikator Kinerja ini adalah membandingkan antara Jumlah Pegawai yang memiliki Sertifikat Kompetensi (Teknis,

Manajerial dan Fungsional) dengan jumlah keseluruhan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat digambarkan capaian kinerja 2 komponen tolak ukur tersebut berbanding lurus, jika jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi bertambah dan jumlah ASN bertambah maka persentase capaian yang diperoleh akan maksimal, namun sebaliknya apabila jumlah ASN bertambah tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pegawai yang bersertifikasi kompetensi maka secara otomatis persentase capaian yang diperoleh akan rendah. Dalam rangka untuk terus meningkatkan persentase capaian ini, akan diupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui BKPSDM dan meningkatkan upaya pengumpulan data pegawai yang bersertifikat kompetensi dari masing-masing OPD khususnya bagi PPPK. BKPSDM akan berupaya meningkatkan kinerja OPD salah satunya dengan menambah kuota pegawai sesuai dengan ketersediaan Anggaran untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat dan pelatihan agar indikator dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu "Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/Tahun" dapat terpenuhi secara maksimal.

3. Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sampai dengan Triwulan II per 30 Juni 2025 memiliki sasaran kinerja yaitu meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah serta dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong entitas unit organisasi dan entitas Satuan Kerja terkhusus bagi BKPSDM untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan

implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (Hasil) yang telah direncanakan. Penilaian atas evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu setelah berakhirnya periode satu Tahun Anggaran. Adapun nilai SAKIP yang diperoleh untuk Tahun 2024 adalah 77,45% dengan predikat BB dari target sebesar 79 sehingga capaiannya adalah sebesar 98,04%, perolehan nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan perolehan nilai sebesar 80,35%.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Bidang Kepegawaian berdasarkan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PERMENDAGRI 86 Tahun 2017

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	9	7	11	17	3	59
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,26	13,23	20,49	7,28	5,32	14
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,07	10,55	24,74	75,25	75,90	78,31
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Orang	33	35	35	33	35	35
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Orang	787	750	700	861	2468	2090
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2800	3300	3450	4392	5542	5780

Capaian IKK sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 untuk periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sampai dengan Triwulan II Per 30 Juni Tahun 2025 terealisasi diantaranya yaitu Diklat Penyusunan Renstra sebanyak 56 peserta dengan 61 JP, Diklat BOSP dengan peserta 46 orang dengan 30 JP, dan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2025 diperoleh dari diperoleh dari total keseluruhan JP dari 2 jenis diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM dengan total peserta sebanyak 102 orang kemudian dibagi dengan jumlah PNS kabupaten luwu timur per 30 Juni 2025 sebanyak 5.222 Orang terdiri dari 3.611 orang PNS dan 1.611 orang PPPK.
2. Kondisi jumlah ASN kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 mencapai 5222 orang (PNS sebanyak 3.611 orang dan PPPK sebanyak 1.611 orang). Dari keseluruhan jumlah ASN tahun 2025 terdapat 102 orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan BKPSDM dan terdapat 2 Jenis Diklat yang diselenggarakan per triwulan II tahun 2025 yang terdiri dari 2 Diklat teknis. Adapun Diklat Teknis yang diselenggarakan diantaranya yaitu Diklat Penyusunan Renstra sebanyak 56 peserta dan Diklat BOSP sebanyak 46 orang peserta,
3. Sebanyak 386 orang Pejabat Struktural Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 terdapat 305 orang yang telah dikembangkan kompetensinya. Dan dari 4.355 orang pejabat fungsional Fungsional Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2025 terdapat 907 Orang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi fungsional. Artinya dari 4.741 orang Pegawai struktural dan fungsional terdapat 1.212 orang yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 yang terisi sebanyak 28 Jabatan. Terdapat 7 jabatan yang lowong diantaranya:
 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Pensiun Dini dengan alasan mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati;
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian yang mutasi ke Kemendikbud Riset dan Teknologi.
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pensiun per 31 Des 2024
 4. Kepala Dinas DPMPSTSP pensiun per 31 Des 2024
 5. Kepala BKPSDM Pensiun Per 1 Feb 2025
 6. Kepala Dinas Sosial dan P3A Pensiun per 1 Maret 2025
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pensiun per 1 Mei 2025

5. Untuk data jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur per 30 Juli 2025 adalah sebanyak 889 orang yang terdiri dari Eselon II 28 Orang, Eselon III 158 orang, Eselon IV 228 orang, dan teknis lainnya 475 orang
6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 4.391 orang, yang terdiri dari 2.781 orang PNS dan 1.611 orang PPPK.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin			99,95%	99,99%	100%	100%	99,78%	99,92%	100%	100%	
2	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			82,10%	83,50%	85%	85%	76,38%	68,19%	85%	85%	
3	Nilai SAKIP			72	77	75,50	75,75	80,35	80,35	75,50	75,75	

Kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang dibidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penempatan pegawai, perumusan dan pengembangan aparatur serta tugas pembantuan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- d. Pelaksanaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur. Susunan organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian :
- d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir, terdiri atas:
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BKPSDM



Berjalannya organisasi BKPSDM sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya saat ini BKPSDM didukung oleh pegawai sebanyak 29 orang PNS dan 17 orang Tenaga Upah Jasa dengan profil demografi disajikan pada tabel 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10 dan 2.2.11; dan 2.2.12

Tabel 2.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan							
2	Sekretariat		9		3			12
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2	3	1				6
4	Bidang Pengadaan Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian		9					9
5	Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir		7	1	1			9
6	Tenaga Fungsional		14					
Jumlah		3	22	1	3	-	-	29

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		IV	III	II	I	PPPK	
1	Kepala Badan	1					1
2	Sekretariat	2	3	2		2	9
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1	3				4
4	Bidang Pengadaan Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian	1	4	1		2	8
5	Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir		7				7
6	Tenaga Fungsional	5	17	3	0	4	29
Jumlah		3	22	1	3	-	29

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Unit Kerja	Tingkat Eselon						Jumlah
		II/b	III/a	III/b	IV/a	Staf PNS	PPPK	
1	Kepala Badan	1						1
2	Sekretariat		1		2	4	2	9
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur			1		2		3
4	Bidang Pengadaan Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian			1		2	2	5
5	Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir			1		2		3
6	Tenaga Fungsional							
Jumlah		1	1	3	2	10	4	21

Tabel 2.9
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	Tingkat Eselon					Jumlah
		III/a	III/b	III/c	III/d	Staf	
1	Kepala Badan						
2	Sekretariat	1					
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur						
4	Bidang Pengadaan Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian	1		1	1		3
5	Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir	1	1	1	2		5
6	Tenaga Fungsional						
Jumlah		3	1	2	3		9

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur

Perencanaan pembangunan jangka menengah OPD tahun 2021 – 2026 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadikan RPJMD sebagai rujukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dalam setiap tahun anggaran.

Isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan SKPD. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isi-isu strategis BKPSDM Kabupaten Luwu Timur.

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur adalah:

- 1) Penilaian Evaluasi Kinerja ASN belum sepenuhnya berdasarkan system merit yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja belum dilakukan secara optimal karena SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) belum dinilai sesuai dengan beban kerja pegawai serta belum adanya regulasi yang dapat dijadikan dasar sebagai instrument dalam melakukan pembobotan dalam menilai kinerja pegawai.

- 2) Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam mekanisme tata kelola manajemen ASN. Beberapa permasalahan yang muncul karena penerapan system merit belum maksimal adalah penempatan ASN yang belum sepenuhnya berbasis pada kompetensi jabatan serta kurangnya pemetaan potensi dan talenta pegawai. Selain itu keterbatasan system informasi manajemen ASN yang belum terintegrasi, kurangnya pemahaman terhadap prinsip system merit serta lemahnya peran pengawasan internal.
- 3) Belum adanya regulasi terkait pemberian sanksi dan penghargaan sebagai stimulus dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam rangka menciptakan birokrasi yang professional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Regulasi terkait pemberian sanksi dan penghargaan memiliki peran strategis dalam tata Kelola kepegawaian. Regulasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap ASN bekerja berdasarkan prinsip kompetensi, integritas dan kinerja.
- 4) Belum memadainya kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan public yang optimal;
- 5) Alokasi kuota untuk pengembangan kompetensi ASN setiap tahunnya masih terbatas;
- 6) Penerapan Diklat satu pintu belum maksimal;
- 7) Sistem layanan Administrasi Kepegawaian berbasis digital belum Terintegrasi secara Keseluruhan

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kepegawaian ASN daerah Kabupaten Luwu Timur, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM terdapat beberapa hal tantangan yang dihadapi BKPSDM dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi:

1. Rendahnya tingkat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara
2. Kurangnya Disiplin Apartur Sipil Negara
3. Belum Maksimalnya pelayanan Kepegawaian
4. Minimnya Kegiatan Diklat Teknis dan Struktural yang dilaksanakan
5. Kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap tugas dan tanggungjawabnya
6. Kurangnya partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam melengkapi Data Kepegawaian
7. Anggaran yang terus mengalami penurunan setiap tahun

Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan Kepegawaian pada ASN;
2. Diterapkannya peraturan pemerintah tentang ASN;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara melalui Pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis, dan pelatihan manajerial;
4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada; dan
5. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen Kepegawaian.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKP

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKP tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, perbedaan pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan BKPSDM. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	pesentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	5,314.593.548	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	pesentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	98%	6.226.971.148	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	221.138.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	263.645.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	87.066.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan	10	80.890.000	

	Perangkat Daerah		(dokumen)			Perangkat Daerah		Perangkat Daerah (dokumen)			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	17.872.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	17.192.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	13.222.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	13.177.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	102.977.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	152.386.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan	98%	3.816.616.298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan	95%	4.678.876.048	

			perangkat daerah					perangkat daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	3,696,769,298	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	4.520.503.048	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	119.847.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	158.373.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan	100%	30.806.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan	100%	47.356.000	

			termanfaatkan					termanfaatkan			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	4	30.806.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	4	47.356.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	226.695.350	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	220.508	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	41.755.350	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	52.928.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)	7	66.740.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	4	71.580.000	

								Pelatihan(Orang)			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	4	22.200.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	0	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Orang)	14	96.000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Orang)	7	96.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	618.059.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	591.033.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	13	10,959,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	10,959,000	

Kantor		(Paket)			Kantor		Kantor yang di sediakan (Paket)			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	15	25.368.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	17	27.267.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	30	33,034,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	29	33,034,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	5	53.960.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	9	52.200.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	4	5,100,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	5	5,100,000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	66.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	417.667.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	380.701.600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	11.971.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	15.772.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang yang terpenuhi (%)	100%	55.280.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang yang terpenuhi (%)	100%	83.620.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	16	14.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	10	10.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	3	41.280.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	6	73.120.000	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	217.300.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	211.934.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat menyurat (Laporan)	4	16.300.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat menyurat (Laporan)	4	130.134.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	4	87.000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	4	91.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	114.000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	90.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik (%)	100%	128.698.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100%	129.998.000	

								terpelihara dengan baik (%)			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	6	17,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	6	17,900,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	6	26,100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	6	27,400,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	88	49,880,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	82	49,880,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	34,818,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	34,818,000	
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	100	3.325.458.250	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	96%	3.107.571.650	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (%)	100%	851.439.250	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (%)	95%	847.743.150	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	82.420.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	92.100.500	

	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	539.807.600	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	4	507.103.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	12	98.742.850	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	4	114.902.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	130.468.800	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	133.637.650	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	100%	722,322,820	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95%	722.551.000	

	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4	186.947.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4	196.766.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	81.404.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12	91.564.000	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	4	422.280.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	438.221.000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan	Persentase Rata-rata Capaian Pengembangan Kompetensi ASN (%)	100%	1.440.353.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan	Persentase Rata-rata Capaian Pengembangan Kompetensi ASN (%)	95%	1.109.292.500	

		ngan komp etensi					ngan komp etensi				
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2	739.194.000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2	682.110.500	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	15	600.200.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	9	320.094.000	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	100	100.959.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	200	107.088.000	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Perse ntase ASN yang mend apat penlai an	Persentase Rata-rata Capaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)	100%	343.035.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Perse ntase ASN yang mend apat penlai an	Persentase Rata-rata Capaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)	95%	424.985.000	

		dan evau asi kinerja					dan evau asi kinerja				
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	4	112.241.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	4	95.523.0 00	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah Orang ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	280	110.774.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah Orang ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	336	113.650. 000	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan (Orang)	15	94.772.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan (Orang)	8414	90.018.0 00	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani (Dokumen)	2	25.248.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani (Dokumen)	4	54.152.0 00	

	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	0	0	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	4	71.642.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	60	3.324.278.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	2,79%	1,964,956,130	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Jumlah ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis melalui BKPSDM (%)	100%	1.053.62.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Jumlah ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis melalui BKPSDM (%)	100%	1.424.803.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	182	893.997.500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	230	1.218.574.000	

	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	2	159.630.500	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasia n, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	4	206.229. 000	

								Umum (Dokumen)			
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	50%	2.270.650.00 0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	95%	1.204.98 4.000	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang	7	21.695.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,	7	74.573.0 00	

	Jabatan Fungsional		Disusun (Dokumen)			Jabatan Fungsional		serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Laporan)	4	2.248.955.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Laporan)	3	1.130.411.000	
Jumlah					11.964.329.798	Jumlah					11.964.329.798

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan pada Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kab. Luwu Timur

No	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Pesentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai Standar	98%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Realisasi Anggaran	95%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	5	

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Aset Teradministrasi	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Dokumen Kepegawaian sesuai Standar	100%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)	4	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Orang)	7	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (Paket)	12	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	17	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	29	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	9	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dokumen)	5	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	100%	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	6	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	4	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang dipelihara secara Berkala	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	6	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	79	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana	1	

	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili	Persentase Penyelesaian Layanan Kepegawaian	96%	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili	Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaiannya	95%	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	4	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	4	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	
	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95%	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	12	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95%	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	9	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	200	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja		Persentase ASN yang	95%	

	Aparatur		mendapat penilaian dan evaluasi kinerja		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	4	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	336	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	8414	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	4	
	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	4	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis melalui BKPSDM	2,79%	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan bersertifikat Kompetensi Teknis melalui BKPSDM	100%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	230	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM (Dokumen)	4	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab.	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan	95%	

		Luwu Timur	Fungsional		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Fungsional yang disusun (Dokumen)	7	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Laporan)	3	

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang berasal dari forum SKPD/hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat/hasil reses DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Adapun program nasional yang dilaksanakan BKPSDM termasuk dalam urusan wajib program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Salah satu program wajib tersebut lebih menekankan pada kebutuhan daerah para penyelenggara pemerintahan yaitu ASN, sehingga kebutuhan akan ASN di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang di butuhkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur melalui kajian Bezetting termasuk PNS yang masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur

Tujuan dan sasaran rencana kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
- b. Menjadi acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan antara Bidang dan Sekretariat pada BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran BKPSDM Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, BKPSDM menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni:

“Mewujudkan sumber Daya Manusia aparatur yang berkualitas”

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di jabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas ASN melalui Diklat;
2. Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian;
3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
2. Visi Kementrian PAN RB
3. Visi BKN Pusat
4. Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	1 Meningkatkan Disiplin Aparatur	1 Persentase ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,75%
			2 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	26,29%
				2. Persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial	78,72%
				3. Persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Fungsional	7,09%

			3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	NILAI AKIP	75,50
--	--	--	---	--	------------	-------

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 / Kepmen 050-3708 Tahun 2020, menguraikan dalam 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp8.486.122.504,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
BELANJA			
BELANJA OPERASI	10.673.356.798	8.486.122.504	(2.187.234.294)
Belanja Pegawai	3.696.769.298	3.426.528.454	(270.240.844)
Belanja Barang dan Jasa	6.976.587.500	5.059.594.050	(1.916.993.450)
BELANJA MODAL	33.600.000	330.510.000	296.910.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.600.000	330.510.000	296.910.000
Jumlah Belanja	10.706.956.798	8.486.122.504	(1.020.370.850)

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN T.A. 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KAB. LUWU TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Ca pai an Pro gra m	Kel uar an Sub Keg iata n	Has il Keg iata n	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolo k Uku r	Tar get		
										Sebel um	Ses ud ah	Sebel um	Ses ud ah	Sebel um	Ses ud ah	Sebelum	Sesudah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									10.706.956.7 98	8.486.122.50 4				10,972,489, 000,00			
5	3				KEPEGAWAIAN									8,866,231,79 8	8,831,172,69 8				8,182,872,00 0			
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			96%	96%					5,165,549,64 8	5.018.937.05 4		97%	97%	5,092,868,00 0		
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan.						100%	100%	205.541.500	141.108.000		100 %	100 %	71,000,000			

5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Kab. Luwu Timur, Malili Puncak Indah			10 Dok	10 Dok			80.560.000	59.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Dok	10 Dok	40.000.000
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Kab. Luwu Timur, Malili Puncak Indah			2 Dok	2 Dok			17.872.500	13.754.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dok	2 Dok	3.000.000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kab. Luwu Timur, Malili Puncak Indah			2 Dok	2 Dok			13.222.000	12.545.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dok	2 Dok	3.000.000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab. Luwu Timur, Malili Puncak Indah			14 Laporan	14 Laporan			93.887.000	55.078.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Dok	10 Dok	25.000.000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termantfaatkan						95%	95%	3.808.056.298	3.497.598.454		95%	95%	3.987.082.000

5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			32 Orang	48 Orang			3.696.769.298	3.426.528.454	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39 orang	39 orang	4.007.518.000
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Laporan	5 Laporan			111.287.000	71.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dok	7 Dok	45.000.000
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar						100 %	100 %	35.146.000	19.344.000		100%	100%	10,000,000
5	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Laporan	4 Laporan			35.146.000	19.344.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	1 Dok	10,000,000
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah						100 %	100 %	220.535.350	140.462.500		100%	100%	120,850,000

5	3	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Dokumen	4 Dokumen			41.755.350	38.202.500	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			7 Orang	7 Orang			66.740.000	17.940.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	5 Orang	38,350,000
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Orang	4 Orang			22.200.000	0	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Orang	4 Orang	37,500,000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			10 Orang	10 Orang			89.840.000	84.320.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	5 Orang	30,000,000
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah						95%	95%	504.312.000	501.097.600		95%	95%	364.900.000

5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			13 Paket	13 Paket			10.959.000	10.959.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Jenis	7 Jenis	13.000.000
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			15 Paket	15 Paket			25.368.000	24.477.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	20 Unit	30,000,000
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			31 Paket	31 Paket			33.034.000	32.894.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Jenis	20 Jenis	10,000,000
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Paket	4 Paket			53.960.000	44.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Jenis	3 Jenis	23.000.000
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Dok	2 Dok			5,100,000	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48 Eks	48 Eks	5,500,000

72

5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Unit	2 Unit			11.700.000	42.400.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	20 Unit	70,000,000
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			8 Unit	16 Unit			34.260.000	300.470.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	5 Unit	50,000,000
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah							0	0	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						100 %	100 %	217.300.500	215.540.500		100 %	100 %	212.000.000
5	3	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Laporan	2 Laporan			16.300.500	16.100.500	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Surat	200 Surat	35,000,000

5	3	1	2 · 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Lap ora n	2 Lap ora n			87.000.000	91.440.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	36 Rek enin g	36 Rek enin g	52.000.000
5	3	1	2 · 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Lap ora n	2 Lap ora n			114.000.000	108.000.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	8 Ora ng	8 Ora ng	126.000,000
5	3	1	2 · 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik						100 %	100 %	128.698.000	160.916.000		100 %	100 %	102.000.000
5	3	1	2 · 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			6 Unit	6 Unit			17.900.000	17.900.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	2 Unit	2 Unit	35.000.000

5	3	1	2 · 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			6 Unit	6 Unit			26.100.000	27.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	4 Unit	13.000.000
5	3	1	2 · 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			79 Unit	79 Unit			49.880.000	45.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 Unit	55 Unit	35.000.000
5	3	1	2 · 0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Unit	1 Unit			34.818.000	69.636.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	1 Unit	50.000.000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	96 %	96 %	2.767.016.650						2.031.349.950		97%	97%	3.225.000.000
5	3	2	2 · 0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN					95 %	95 %	721.279.650	579.012.650			95%	95%	970.000.000

5	3	2	2 · 0 1	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Do k.	1 Do k.			74.140.000	38.256.000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1.620 Formasi	1,620 Formasi	350,000,000
5	3	2	2 · 0 1	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Do k.	4 Do k.			524.521.000	394.449.000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	500 Orang	550,000,000
5	3	2	2 · 0 1	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Do k	4 Do k			75.314.000	86.185.000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	135,000,000
5	3	2	2 · 0 1	1 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Do k	4 Do k			47.304.650	60.122.650	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	5 Aplikasi	5 Aplikasi	50,000,000
5	3	2	2 · 0		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase rata-rata capaian pengelolaan mutasi						95 %	95 %	631.877.000	685.523.000		95%	95%	800,000,000

			2			dan promosi ASN													
5	3	2	2 · 0 2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Do k	4 Do k			161.925.000	119.089.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	84.8 9%	84.8 9%	150,000,000
5	3	2	2 · 0 2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Do k	4 Do k			50.304.000	76.016.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100 %	100 %	300,000,000
5	3	2	2 · 0 2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Do k	1 Do k			419.648.000	490.418.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100 %	100 %	300,000,000
5	3	2	2 · 0 3		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase rata-rata capaian pengembangan kompetensi ASN						95 %	95 %	1.121.815.00 0	555.656.300		95%	95%	1.1140.000.0 00
5	3	2	2 · 0 3	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk			2 Do k	2 Do k			686.912.000	197.305.500	PEND APAT AN ASLI DAER	95%	95%	250,000,000

							Indah									AH (PAD)			
5	3	2	2 0 3	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Ora ng	5 Ora ng			360.342.000	323.969.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	20 Ora ng	20 Ora ng	1.320.000
5	3	2	2 0 3	1 4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			500 Ora ng	500 Ora ng			74.561.000	34.381.800	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	90%	90%	100,000,000
5	3	2	2 0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	90%	90 %	27 7,1 80, 94 0	273 ,68 0,9 40		95 %	95 %	292.045.000	211.158.000	3	2	2.04	315.000.000
5	3	2	2 0 4	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Do k	4 Do k			75.197.000	42.991.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100 %	100 %	100,000,000
5	3	2	2 0 4	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			280 Ora ng	280 Ora ng			78.990.000	71.390.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100 %	100 %	90.000.000
5	3	2	2	7	Pembinaan Disiplin	Jumlah ASN yang	Kab.			5	20			62.271.000	57.968.000	PEND			10,000,000

			04	ASN	Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			Orang	Orang					APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	
5	3	2	204	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Dok	2 Dok			16.248.000	19.753.000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	75%	75%	45,000,000
5	3	2	204	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Laporan	2 Laporan			59.339.000	19.056.000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	100,000,000
5	4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									2.774.390.500	1.766.345.500				2.789.617.000
5	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20JP/Tahun		20 %	20 %					2.774.390.500	1.766.345				2.789.617.000
5	4	2	201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM					95 %	95 %		1.310.478.500	1.619.355.500		100 %	100 %	1.464.100.000

5	4	2	2 0 1	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			170 Orang	333 Orang			1.181.818.000	1.454.790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130 Orang	130 Orang	1.080.300.000
5	4	2	2 0 1	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			3 Dok	3 Dok			128.660.500	164.565.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Jenis	3 Jenis	110,500,000

						ara Urusan Pemerintah n Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah n Umum (Dokumen)												
5	4	2	2 · 0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					95 %	95 %	146.990.000	146.990.000		95%	95%	1.325.517.00 0
5	4	2	2 · 0 2	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan , Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembang an Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah				8 Do k	8 Do k	19.305.000	19.305.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	4 Jeni s	4 Jeni s	30,000,000

						Tinggi, Kepemimpina n dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional yang Disusun													
5	4	2	2 · 0 2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelengg araan Pengemban gan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpin an dan Prajabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			3 Lap	3 Lap			127.685.000	127.685.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100 %	100 %	788.297.000
TOTAL														10.706.956.7 98	8.816.632.50 4	11.176.965.00			

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang menggambarkan jumlah program, jumlah kegiatan, serta alokasi kebutuhan dana Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPSDM Tahun 2026

No.	Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98%	6.024.152.498	PAD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	152.121.100	PAD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	70.416.700	PAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.357.200	PAD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	2	9.332.400	PAD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14	60.014.800	PAD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	4.695.977.448	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	48	4.610.781.448	PAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	85.196.000	PAD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	33.127.600	PAD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	33.127.600	PAD

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	134.438.600	PAD
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	35.048.600	PAD
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	7	30.050.000	PAD
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	0	PAD
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	69.340.000	PAD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	451.550.100	PAD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)	13	10.544.800,00	PAD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	15	15.227.500	PAD
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor(paket)	31	17.151.300	PAD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	4	29.776.600	PAD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	2	5,100,000	PAD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	46.200.000	PAD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	317.603.000	PAD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	9.946.900	PAD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.000.000	PAD
1	Pengadaan Mebel (Unit)	2	15.000.000	PAD
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	16	91.710.000	PAD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	197.177.400	PAD
1	Penyediaan Jasa Surat	2	16.313.400	PAD

	Menyurat (Laporan)			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	2	90.864.000	PAD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	2	90.000.000	PAD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	253.050.250	PAD
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	6	44.000.000,	PAD
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	79	52.680.000	PAD
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	1	156.370.250	PAD
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	98%	2.516.901.800	PAD
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95%	452.113.400	PAD
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	72.500.600	PAD
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	4	168.786.800,	PAD
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	4	94.845.400	PAD
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	115.980.600	PAD
2	Mutasi dan Promosi ASN	95%	538.092.200	
1	Pengelolaan Mutasi ASN (Dokumen)	4	125.291.000	PAD
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	36.792.000	PAD
3	Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	376.009.200	PAD
3	Pengembangan Kompetensi ASN	95%	1.074.978.100	
1	Pengelolaan Assessment Center	2	413.815.100	PAD

	(Dokumen)			
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Orang)	5	579.713.400	PAD
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Orang)	500	81.449.600,	PAD
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	451.718.100	PAD
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	4	90.465.600	PAD
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai(Orang)	248	104.941.200	PAD
3	Pembinaan Disiplin ASN (Orang)	20	173.019.300	PAD
4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (Dokumen)	2	25.601.200	PAD
5	Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	2	57.690.800	PAD
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	40%	6.697.835.500	PAD
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	. 1.458.845.900,	PAD
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Orang)	170	. 1.320.447.600,	PAD
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	3	138.398.300	PAD
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	. 5.238.989.600	PAD

1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional (Dokumen)	8	. 71.548.600,	PAD
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	3	5.167.441.000	PAD
JUMLAH			15.238.889.798	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun 2025.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak begitupun dukungan dari segi penganggaran karena tanpa anggaran yang cukup tentunya akan ada beberapa kegiatan termasuk program nasional yang akan tertunda atau tidak dapat dilaksanakan yang berakibat tidak optimalnya capaian kinerja BKPSDM.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025 tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu, masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta keberlanjutan dan konsistensi pembangunan.

Adapun rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 yaitu dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu atau mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai amanat peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi target kinerja dan anggaran tahun sebelumnya sebagai bahan selanjutnya, perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Aamiin

Malili, 01 September 2025

Plt. KEPALA BKPSDM,



RARHA ARIEF, S.AP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19840114 200312 2 001